

ABSTRAK

Fadli Syafei, 1218010057, 2025: "Implementasi Kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) Dalam Menekan Angka Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Kabupaten Indramayu"

Tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri dari Kabupaten Indramayu, khususnya perempuan di sektor informal, menjadi permasalahan serius yang perlu ditangani secara sistematis. Fenomena ini disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja lokal serta kurangnya informasi dan edukasi mengenai risiko migrasi. Akibatnya, banyak pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan ketidakpastian hukum di negara tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perempuan Berdikari (Pe-Ri) dalam menekan angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Indramayu. Fokus utama penelitian adalah menilai efektivitas kebijakan dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai empat dimensi utama dalam implementasi kebijakan publik.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam (Pramono 2020) yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Keempat dimensi tersebut menjadi tolok ukur untuk mengkaji sejauh mana kebijakan Pe-Ri dapat menjawab persoalan migrasi tenaga kerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari aparatur Dinas Tenaga Kerja, pelaksana program di tingkat desa, serta peserta program Pe-Ri. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pe-Ri masih menghadapi berbagai kendala. Komunikasi kebijakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal, keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program, disposisi pelaksana belum sepenuhnya menunjukkan inisiatif dan keselarasan, serta struktur birokrasi masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik. Meskipun demikian, terdapat komitmen positif dari pemerintah daerah untuk terus mengembangkan program sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi lokal bagi purna pekerja migran.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Migrasi Tenaga Kerja, Perempuan Berdikari*